

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin Mochtar, Zainal, 2017, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataan Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*, konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konpress, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Bumi Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Astomo, Putera, 2014, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam dan Ibrahim Ambong, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- C., Anwar, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD NRI 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang.

- Djaja, Ermansjah, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 versi UU Nomor 30 Tahun 2002)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fatkhurohman, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ghofar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2004, *Politik Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Indra, Mexsasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Isra, Saldi *et al*, 2010, *Perkembangan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi, dari berpikir hukum tekstual ke hukum progresif*, Sekjen MK dan Pusako Universitas Andalas, Padang.
- Kusnardi, Moh. & Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit FH UI, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV. Sinar Bakti, Jakarta.
- Kristanto, Tri Agung, 2009, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta.
- Latief, Abdul, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, CV. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Lubis, M. Solly, 2008, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung
- Manan, Bagir, 2003, *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, FH-UII Press, Yogyakarta.
- Mh, Isnaeni, 1982, *MPR-DPR Sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta.

- Moh. Mahfud, 2001, *Dasar dan struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Palguna, I. D. G, 2018, *Mahkamah Konstitusi dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan Dengan Negara Lain*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Siahaan, Maruar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulardi, Soimin, 2004, *Hubungan Badan Legislatif dan Yudikatif*, UMM Press, Malang
- Sumardjono, Maria S. W., 2001, *Pedoman Pembuatan Penelitian*, Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suny, Ismail, 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara: Suatu Penyelidikan Perbandingan dalam Hukum Tata Negara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral*, Alumni Bandung, Bandung.
- Thaib, Dahlan, 2000, *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Pranada Media Grup, Jakarta

## **B. Artikel/Jurnal**

Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Pengorganisasian Kekuasaan Legislatif dan eksekutif*, Jurnal Keadilan, Vol. 2 No. 1.

Isra, Saldi, 2013, “Hubungan Presiden dengan DPR”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 3, September.

Laica Marzuki, 2007, “Membangun Undang-Undang Yang Ideal”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 4 No. 2, Juni.

Marzuki, Peter Mahmud, 2001, “Penelitian Hukum”, *Yuridika*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, Vol. 16 No. 2, Maret.

Mei Susanto, 2018, “Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3.

Wawan Ichwanuddin, 2012, “Absennya Politik Pengawasan DPR pada Era Reformasi”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, No. 2, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

## **C. Internet**

Bagus Prihantoro, Hak Angket DPR dari Zaman Bung Karno Hingga Kini, <https://news.detik.com/berita/d-3486903/hak-angket-dpr-dari-zaman-bung-karno-hingga-kini/>

Wawan Ichwanuddin, “Absennya Politik Pengawasan DPR pada Era Reformasi”, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/233/107>.

“Kontradiksi Putusan Kedudukan KPK, Begini Pandangan Pakar”; <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5a805fe0efdd5/kontradiksi-putusan-kedudukan-kpk-begini-pandangan-pakar/>.

Moh. Nadlir, “MK Bantah Putusannya Soal Pansus Hak Angket KPK Inkonsisten”, <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/15/16560911/mk-bantah-putusannya-soal-pansus-hak-angket-kpk-inkonsisten>

## **D. Peraturan Perundang-undangan**

Konstitusi RIS

## UUDS 1950

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017